

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Definisi

Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Secara terminologi bahwa efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak tergantung dengan cara tugas tersebut dapat diselesaikan.¹ Efektivitas pada dasarnya mengacu kepada keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas yaitu salah satu dimensi dari produktivitas pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.²

Menurut Mahmudi efektivitas yaitu hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam pencapaian tujuan dapat dilihat seberapa jauh kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai.³ Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

¹ Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan* (Jakarta : CV Masagung,2002), 149

² E.Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT.Remaja Resda Karya, 2004), 82

³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: JKPN, 2005), 92

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan dahulu.

2. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Menurut Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut: ⁵

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat berdasarkan pada jumlah atau banyaknya dan dapat berdasarkan pada mutu.
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

⁴ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 29

⁵ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 13

- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

3. Ukuran Efektivitas Program

Efektivitas suatu program dievaluasi atau diukur sejauh mana kegiatan program yang dilaksanakan akan mencapai tujuan awal program. Keberhasilan program dapat dilihat dari efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Efektivitas program dapat dilihat dengan membandingkan hasil dengan tujuan program, dan pendapat peserta program dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui efektivitas program. Menurut Budiani suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut untuk mengukur semua faktor yang dapat melihat berjalan atau tidaknya suatu program, sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat dan sasaran peserta.
- c. Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

- d. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.⁶

B. Teori Pengembangan Usaha Mikro

1. Definisi

Pengembangan adalah suatu kegiatan menjadikan bertambah dan berubah. Terdapat tiga tahapan dalam kegiatan proses pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta penyempurnaan⁷ Pengembangan ini secara umum berarti pertumbuhan, suatu proses perubahan secara perlahan dan bertahap.⁸ Menurut Mulyadi Nitisusantro, pengembangan suatu usaha ialah upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam pemberdayaan usaha dengan adanya bimbingan pendampingan dan bantuan dalam peningkatan keahlian serta daya saing dalam mengelola usaha.⁹ Sedangkan usaha mikro menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan : “Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan memenuhi kriteria usaha mikro seperti diatur dalam

⁶ Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Progam Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Bbhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPU. Volume 2 No 1, 20

⁷ Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), 53

⁸ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 218

⁹ Mulyadi Nitisusantro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 271

Undang-Undang tersebut”.¹⁰ Kriteria kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp.50.000.000,00 dan sebanyak Rp. 300.000.000,00 ialah hasil penjualan tahunan.¹¹

2. Karakteristik Usaha Mikro

Luasnya pasar di Indonesia menjadikan usaha mikro memiliki kesempatan besar dalam pengembangan usahanya selain itu diikuti juga dengan kemudahan memperoleh bahan baku serta banyaknya sumber daya manusia yang semakin memperkuat berkembangnya usaha mereka. Menurut Pandji Anoraga usaha mikro memiliki karakteristik yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana dan cenderung tidak memakai tata cara penulisan pembukuan standart administrasi, margin usaha cenderung tipis akibat tingginya persaingan, modal terbatas, pengalaman sangat terbatas, lemahnya kemampuan promosi produk dan rendahnya keahlian untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal.¹²

3. Jenis-Jenis Strategi Pengembangan Usaha

a. Strategi Pengembangan Produk

Suatu proses perbaikan produk atau jasa untuk mengusahakan terjadinya kenaikan penjualan.¹³

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Miro Kecil dan Menengh di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3S, 2012), 17

¹¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

¹² Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 32

¹³David Fred R, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 251

b. Strategi Pengembangan Pasar

Menurut David waktu yang tepat untuk pengembangan pasar yaitu ketika dapat diandalkan penyaluran distribusi baru yang tersedia, harga terjangkau dengan kualitas optimal, ketika belum adanya pengembangan dan belum ada kejenuhan saat munculnya pasar baru, ketika suatu usaha dalam pengelolaan perluasan operasi memiliki dana dan sumber daya manusia yang memadai.¹⁴

c. Strategi Pengembangan Konsentrasi

Fokus terhadap kombinasi produk dan pasar tertentu, diikuti dengan adanya dukungan pengembangan ketrampilan dan kompetensi kemampuan.

b. Strategi Inovasi

Upaya untuk terus mengembangkan produk-produk yang ditawarkan dengan berorientasi terhadap kemajuan teknologi.

4. Tahapan Pengembangan Usaha

Menurut Pandji Anoraga tahapan dalam pengembangan usaha adalah indentifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, seleksi alternatif, pelaksanaan alternatif terpilih dan evaluasi.¹⁵

¹⁴ Ibid, 259

¹⁵ Pandji Anoraga, Pendekatan Bisnis Dalam Era Globalisasi, (Jakarta: Rineka Cipta 2007), 90

C. Teori Manajemen Syariah

1. Definisi

Dalam prespektif Islam, segala hal yang dilakukan haruslah dengan benar, rapi, tertib dan teratur. Selain itu perlu diikuti secara baik segala proses yang tengah berlangsung dan jangan melakukan asal-asalan. Proses-proses manajemen sebenarnya merupakan semua perencanaan yang tepat untuk melahirkan keyakinan dan dijalankan juga sesuai aturan serta mempunyai manfaat. Pada hadist yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

وَوَالِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
يَعْنِيهِ مَا لَا تَرَكُهُ الْمَرْءُ إِسْلَامَ حُسْنٍ مِنْ : سَلَّمَ

Artinya : “Diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.” (HR. Tirmidzi).

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Apabila perbuatan itu tidak pernah direncanakan, oleh karena itu tidak tergolong dalam manajemen yang baik. Sementara itu, syariah secara ringkas diartikan sebagai aturan dimana mengatur segala sesuatu menurut aturan yang berasal dari Allah SWT agar selamat dunia dan akhirat. Tahapan-tahapan dalam manajemen pada dasarnya merupakan berbagai cara untuk melaksanakan persiapan dengan baik agar menciptakan suatu manfaat.¹⁶ Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang ter “*manage*” dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS Ash-Shaff [61]:4

¹⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok: Rajawali Pess, 2020), 2

مَرصُوصٌ بُنِيْنٌ كَأَنَّهْم صَفًا سَبِيْلَهٗ فِي يُقْتَلُوْنَ الَّذِيْنَ يُحِبُّ اللهُ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, rapi, seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang kokoh. (QS Ash Shaff [61]: 4)

Kokoh disini bermakna terdapat sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Apabila hal ini terjadi, akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Selain itu manajemen syariah ini bermanfaat sebagai pegangan manusia untuk menyusun berbagai hal supaya dilaksanakan secara baik, tepat, terarah dan tuntas sesuai syariat Islam.¹⁷

2. Fungsi – Fungsi Manajemen Syariah

a. Perencanaan (*Planning*)¹⁸

Perencanaan bagian dari sunatullah, Konsep dalam manajemen syariah menerangkan bahwa dalam menjalankan berbagai kegiatan dimasa depan untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan menyesuaikan dengan keadaan masa lampau, sekarang ini, serta perkiraan masa datang. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas.

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1

¹⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok: Rajawali Pess, 2020), 87

b. Organisasi (*Organizing*)

Seorang pemimpin atau *Ulil Amri* ialah seseorang yang mengemban amanah mengelola dengan baik urusan orang lain. Maksudnya, pemimpin ialah seseorang yang mengemban amanah dalam mengurus masyarakat. Pemimpin juga sering disebut *Khadimul Ummah* yang artinya pemimpin harus meletakkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin yang bersikap melayani akan melahirkan suatu kekuatan. Menurut perspektif Islam tolak ukur dari pimpinan yang sukses ketika disukai oleh bawahannya, pimpinan yang dapat menampung aspirasi bawahannya, pemimpin yang tegas dan selalu bermusyawarah.¹⁹

c. Penggerakan/kepemimpinan (*Actuating*)

Pelaksanaan yaitu sebuah aspek penting dalam fungsi manajemen dikarenakan merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok dari tingkatan atas sampai bawah berupaya mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan baik.²⁰ Implementasi dari pelaksanaan yaitu tindakan dalam membimbing, mengarahkan, serta menggerakkan para karyawan agar bekerja dengan baik, tekun, tenang.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pencocokan kesesuaian antara kegiatan pekerjaan dilapangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk tercapainya tujuan

¹⁹ Ibid, 130

²⁰ Abdul Msanan, *Membangun Islam Kaffah*, (Yogyakarta: Madrid Pustaka 2000), 15

organisasi. Dalam perspektif Islam didalam pengawasan terbagi oleh Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri sumbernya tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, akan lebih efektif jika sistem pengawasan dilaksanakan dari luar diri sendiri.²¹ Keefektifan dalam pengawasan dapat membantu mengatur pekerjaan dan memastikan berlangsung sesuai dengan rencana²².

2. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah²³

a. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip ideologi dalam Islam. Al-Qur'an mengutus umatnya agar mampu mengambil keputusan dengan menjunjung tinggi pada kesetaraan derajat dan mendapatkan sesuatu pada proporsinya, keutuhan dan keterbukaan. Oleh karena itu keadilan sangat penting dijalankan saat berhubungan kepada sesama manusia.

b. Amanah dan tanggung jawab

Dalam manajemen syariah dianjurkan untuk senantiasa menjalankan amanah disegala hal, mulai dari amanah kelompok atau perorangan. Sedangkan tanggung jawab berkaitan pada tanggung jawab manusia atas semua aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan tanggung jawab pada manusia sebagai masyarakat.

²¹ Ibid, 167

²² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005), 3

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), AMPYKPN, 2002), 153

c. Komunikasi (Musyawarah)

Pada manajemen syariah, komunikasi merupakan faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diinginkan.

